JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 11 No. 01 Januari - Maret: 51 – 59
e-ISSN 2460-6235
p-ISSN 2715-5722
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara

Oleh:

Muhammad Iqbal[1)*], Ervina Rosarina Hasibuan[2)], Khalila Husnasari[3)]
[1,2&3)]Politeknik Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email : mhdiqbal@polmed.ac.id[1)]

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 04 Februari 2026

Artikel Diterima: 15 Maret 2026

Copyright (c) 2026 JAKU E-Journal

ABSTRACT

This study aims to examine how local government financial performance impacts the Human Development Index (HDI), spesifically fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio of local revenue, and local financial efficiency ratio. The sample used in this study consisted of 33 regencies and cities in North Sumatra Province, using secondary data in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and its realization, as well as the HDI values of regencies and cities in North Sumatra. This study used the SPSS software to analyze the data. The results of the partial test stated that fiscal decentralization ratio and effectiveness ratio of local revenue had an effect on the HDI of regencies and cities in North Sumatra, while local financial efficiency ratio had no effect on HDI. The results of the simultaneous test stated that fiscal decentralization ratio, effectiveness ratio of local revenue, and local financial efficiency ratio together had an effect on the HDI. These findings imply that local governments should prioritize strengthening fiscal autonomy and improving the effectiveness of revenue collection to enhance human development outcomes, while also reevaluating financial efficiency policies to ensure that budget allocations are not only cost efficient but also development oriented.

Keywords: *Human Development Index, Government Financial Performance, Fiscal Decentralization, Effectiveness, Efficiency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan PEMDA dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan rasio efisiensi keuangan daerah. Sampel yang digunakan mencakup 33 kabupaten dan kota yang berada di Sumatera Utara, dengan memanfaatkan data sekunder yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta realisasinya dan nilai IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara. Analisis data yang diterapkan pada studi ini dibantu menggunakan program aplikasi SPSS. Hasil pengujian dengan cara parsial menyatakan rasio desentralisasi fiskal dan efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Hasil uji secara simultan menyatakan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan berpengaruh pada IPM. Temuan ini memiliki implikasi bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan kemandirian fiskal serta meningkatkan efektivitas pengumpulan pendapatan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia, sekaligus mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi keuangan agar alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada efisiensi biaya, tetapi juga pada pencapaian pembangunan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Kinerja Keuangan Pemerintah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas, Efisiensi

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang berjalan di Indonesia saat ini menggambarkan proses desentralisasi. Sasaran utama otonomi daerah di Indonesia adalah meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah (PEMDA) dapat memanajemeni urusannya secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Penyerahan hak otonomi kepada daerah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatannya sambil menjamin bahwa pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan dengan akuntabilitas, partisipasif, dan transparansi.

Kesuksesan PEMDA dalam menjalankan pembangunan dan memberikan layanan sosial kepada masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengelola pendapatan daerah (Iqbal, 2025). Menurut (G. R. Wibawa & Arif, 2022), Kinerja yang baik dalam keuangan PEMDA diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kinerja keuangan daerah dari segi finansial merupakan upaya untuk mengevaluasi tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan perannya (Siregar, 2023a). Terdapat beragam rasio keuangan yang dapat diterapkan dalam mengukur kinerja keuangan PEMDA, termasuk rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Penerapan otonomi daerah di setiap wilayah di Indonesia bertujuan untuk memperkuat kemandirian finansial dan juga untuk mengotimalkan kesejahteraan masyarakat setempat (A. V. G. Ramadhan & Setiawati, 2022). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengevaluasi berbagai sudut pandang terkait perkembangan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Siregar, 2023a). IPM adalah instrumen yang krusial dalam mengevaluasi seberapa efektif upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, Indeks IPM berperan dalam menentukan posisi atau tingkat kemajuan suatu negara atau daerah dengan mengacu pada kriteria yang mencakup standar hidup yang layak, pendidikan dan kesehatan (Sari & Riharjo, 2020).

Dalam katalog Badan Pusat Statistik (BPS) tentang IPM dijelaskan bahwa IPM dimanfaatkan untuk mengevaluasi seberapa jauh pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah dengan cara memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas (Hardana & Nasution, 2022).

Dari informasi nilai IPM dari tahun 2022-2024, Nilai IPM dari 33 kabupaten serta kota di Sumatera Utara mengalami peningkatan bervariasi tiap tahunnya, akan tetapi kenaikan tersebut masih tergolong *stagnan* dikarenakan pada tahun 2021 terdapat 20 kabupaten/kota atau sebesar 60,61% yang nilai IPM daerahnya lebih rendah daripada nilai IPM provinsi, tahun 2022 dan 2023 juga terdapat 20 kabupaten/kota yang nilai IPM daerahnya juga masih lebih rendah dibandingkan nilai IPM provinsi.

Data tersebut menunjukkan bahwa PEMDA kabupaten serta kota di Provinsi Sumatera Utara kurang maksimal dalam mengatur keuangan daerah mereka yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan daerah tersebut. IPM dikenal juga sebagai salah satu ukuran penting yang sering dimanfaatkan untuk menilai tindakan dan *outcome* dari kegiatan pembangunan di suatu wilayah secara komprehensif (Lupita & Rahman, 2025).

Penelitian terkait rasio kinerja keuangan PEMDA terhadap IPM telah dilakukan, diantaranya (Dwiyandari & Badera, 2018) dan (G. R. Wibawa & Arif, 2022) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan memengaruhi IPM, penelitian (Anggraini & Sutaryo, n.d.), (Sari & Riharjo, 2020) dan (Lupita & Rahman, 2025) menghasilkan rasio desentralisasi fiskal memengaruhi IPM sedangkan rasio efektivitas PAD tidak memengaruhi IPM. Penelitian (Maulana, 2023) menghasilkan rasio derajat desentralisasi fiskal memengaruhi IPM, sedangkan (Asri et al., 2025) menyatakan rasio derajat desentralisasi fiskal tidak memengaruhi IPM. (Prabowo, 2025) menyatakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal serta efektivitas PAD tidak memengaruhi IPM sedangkan efesiensi keuangan daerah memengaruhi IPM.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dampak rasio keuangan daerah terhadap IPM dan IPM juga menjadi satu di antara tolok ukur yang dapat dimanfaatkan dalam menilai kinerja PEMDA. Sejalan dengan hal itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dampak rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah pada IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara, baik dengan mekanisme parsial serta simultan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman aspek-aspek yang memengaruhi nilai indeks IPM daerah, sehingga

kebijakan fiskal daerah bisa dirumuskan secara lebih tepat dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Sumatera Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD ialah dokumen yang menyusun perencanaan aktivitas PEMDA, mencakup semua pendapatan serta pengeluaran di tingkat provinsi, kota, serta kabupaten, yang diperuntukkan untuk mencapai sasaran pembangunan selama satu tahun. Rencana ini diungkapkan dalam ukuran uang dan harus mendapatkan persetujuan dari DPRD melalui peraturan yang dikenal sebagai Peraturan Daerah (PERDA) (Badrudin, 2017). Rencana ini, di satu sisi, menggambarkan estimasi pengeluaran maksimal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan daerah dalam suatu tahun anggaran. Keuangan publik tak sekadar merepresentasikan langkah pemerintah dalam menghimpun sumber daya, namun juga mengindikasikan seperti apa dana tersebut dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Ghazali, 2023).

2.2 Kinerja Keuangan PEMDA

Kinerja adalah prestasi yang diraih serta hasil konkret dari pemanfaatan anggaran yang dilakukan secara berdaya guna, efektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Kinerja sebuah organisasi dianggap baik apabila mampu meraih target yang telah ditentukan dengan parameter yang tinggi dan biaya yang minim (Siregar, 2023a).

Satu diantara upaya untuk mengevaluasi kinerja keuangan PEMDA ialah dengan memanfaatkan rasio keuangan, di antaranya adalah rasio efisiensi (Mataris & Digdowiseiso, 2022; Siregar, 2023b; Zuhdi et al., 2023), rasio efektivitas PAD (M. Ramadhan et al., 2022; Siregar, 2023b; A. Wibawa et al., 2023; Zuhdi et al., 2023)), dan rasio desentralisasi fiskal (Asri et al., 2025; Lupita & Rahman, 2025; Maulana, 2023; Prabowo, 2025)

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM ialah parameter yang dimanfaatkan guna menilai pertumbuhan dalam aspek pembangunan manusia (Ulumi et al., 2024). Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam (A. V. G. Ramadhan & Setiawati, 2022), IPM menggambarkan cara masyarakat mendapatkan keuntungan dari pembangunan perihal pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Angka IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah berhasil dalam menyediakan sarana dasar yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakatnya, sedangkan nilai IPM yang rendah menunjukkan bahwa akses terhadap sarana masih menjadi suatu permasalahan (Yulianti & Qomariah, 2025).

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Rasio Desentralisi Fiskal terhadap IPM

Rasio desentralisasi fiskal ialah sebuah alat ukur keuangan yang dapat mengungkapkan sejauh mana kemampuan PEMDA dalam meningkatkan PAD untuk mendukung proses pembangunan. Dengan penerapan desentralisasi fiskal yang maksimal, PEMDA mendapatkan kebebasan yang lebih besar untuk merancang rencana kerja yang sesuai dengan ciri khas daerah atau masalah masyarakat yang spesifik. (Prabowo, 2025)

Rasio desentralisasi fiskal ditentukan dengan melakukan perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah. Apabila PAD yang dicapai suatu wilayah mengalami peningkatan, maka dana yang dapat dipakai oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan publik juga akan meningkat. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas harapan hidup, kualitas pendidikan, dan kualitas standar hidup yang memadai, yang ketiganya merupakan landasan dalam penilaian Indeks IPM (Sari & Riharjo, 2020).

Beberapa penelitian terkait pengaruh rasio desentralisasi fiskal pada IPM telah dilakukan oleh (Lupita & Rahman, 2025; Sari & Riharjo, 2020; G. R. Wibawa & Arif, 2022) yang menunjukan secara empiris bahwa rasio desentralisasi fiskal memengaruhi IPM.

H1: Rasio Desentralisasi Fiskal berpengaruh IPM

2.4.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap IPM

Rasio Pengukuran efektivitas PAD memperlihatkan seberapa jauh PEMDA dapat mencapai perolehan PAD sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Apabila pengelolaan PAD dilakukan dengan optimal, pemerintah daerah akan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih

luas untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor penting dan pembangunan sarana/prasarana fundamental (Prabowo, 2025).

Rasio efektivitas PAD dinilai dengan menghitung perbandingan realisasi PAD dengan target PAD. Diharapkan bahwa pengelolaan PAD yang efektif oleh PEMDA mampu memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung realisasi berbagai program, khususnya dalam layanan publik yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, serta sektor lainnya yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat mencapai tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi.

(Adipura et al., 2022; Hamimah & Zulkarnain, 2020; Siregar, 2023b) melakukan penelitian terkait hubungan rasio efektivitas PAD dengan IPM dengan hasil penelitian menunjukan bahwa rasio efektivitas PAD memengaruhi IPM.

H2: Rasio Efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM

2.4.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah IPM

Rasio efisiensi dalam keuangan daerah menunjukkan sejauh mana PEMDA dapat mengurus dan memanfaatkan keuangan dengan baik untuk mendapatkan hasil pembangunan yang diinginkan (Prabowo, 2025). Rasio efisiensi keuangan daerah dinilai dengan cara menghitung perbandingan antara total belanja yang dibelanjakan untuk memperoleh pendapatan dengan total pendapatan yang benar-benar diperoleh (Sari & Riharjo, 2020).

PEMDA harus secara teliti mengevaluasi pengeluaran yang dilakukan untuk merealisasikan semua pendapatan yang diterimanya agar bisa mengetahui seberapa efisien proses pemungutan pendapatan tersebut. Daerah yang mampu mengatur anggaran secara efisien akan lebih dapat menyediakan layanan publik yang baik dan terjangkau, sehingga pelayanan publik yang optimal dapat meningkatkan nilai IPM yang tinggi.

Penelitian (Prabowo, 2025) melihat hubungan antara rasio efisiensi keuangan daerah terhadap IPM dimana hasil studi tersebut menyatakan rasio efisiensi keuangan daerah memengaruhi IPM.

H3: Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM

2.4.4 Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap IPM

PEMDA memiliki wewenang besar di masa otonomi sekarang harus dapat memanfaatkan alokasi yang ada semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hardana & Nasution, 2022). Mengukur kinerja keuangan daerah adalah hal yang sangat esensial untuk mengevaluasi seberapa baik PEMDA menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja keuangan daerah merupakan data yang sangat krusial, terutama dalam merancang kebijakan yang berhubungan dengan manajemen keuangan daerah serta menilai seberapa efektif PEMDA dalam mengelola sumber daya keuangannya (Dwiyandari & Badera, 2018). Terdapat sejumlah rasio keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kinerja keuangan PEMDA, diantaranya rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Hasil peneltian terdahulu yang dilakukan (Adipura et al., 2022; Sari & Riharjo, 2020) menunjukkan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan dapat memengaruhi IPM.

H4: Rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM

3. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kuantitatif, yakni pengujian hipotesis melalui cara mengukur variabel dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode kuantitatif diterapkan karena dapat menghasilkan data yang dapat diukur. Data kuantitatif ialah tipe data yang berbentuk angka dan diperoleh melalui penghitungan karakteristik pengukuran setiap variabel (Chandrarin, 2017).

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diaplikasikan dalam studi ini merupakan data sekunder, yaitu data yang terdapat dalam tampilan numerik atau data yang telah diubah menjadi angka (penilaian) (Sugiyono, 2023). Data penelitian ini bersumber dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan BPS Sumatera Utara.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini terdiri dari APBD dan Laporan Realisasi APBD tahun 2022 hingga 2024 dari Pemerintah Kabupaten serta Kota yang terdapat di Sumatera Utara yaitu 33 Kabupaten dan Kota. Pada penelitian ini, metode yang diterapkan dalam penetapan sampel adalah sampling jenuh yang mana melibatkan seluruh populasi menjadi bagian dari sampel (Sugiyono, 2023).

3.3 Operasional Variabel

IPM berfungsi sebagai variabel dependen (Y) pada penelitian ini, sedangkan rasio desentralisasi fiskal (X1), rasio efektivitas PAD (X2) dan rasio efisiensi keuangan daerah (X3) berperan sebagai variabel independen (X). Penelitian ini memanfaatkan aplikasi SPSS versi 26 for Windows untuk melakukan pengolahan serta pengujian data. Teknik analisis data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, diterapkan guna menjamin bahwa model regresi memenuhi kriteria secara statistic.
2. uji t, dilakukan dalam menganalisis pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen
3. uji f, dilakukan dalam menganalisis pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen
4. uji koefisien determinasi, diterapkan untuk menganalisis besarnya signifikan variasi dari pengaruh variabel rasio keuangan daerah terhadap IPM.

Berikut persamaan regresi pada penelitian ini: $Y = \alpha + \beta1X1 + \beta2X2 + \beta3X3 + e$

Keterangan :

Y : IPM

α : Nilai Konstanta

β1, β2,β3 : Koefisien Beta

X1 : Rasio Desentralisasi Fiskal

X2 : Rasio Efektivitas PAD

X3 : Rasio Efisiensi keuangan daerah

e : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas

Dalam pengecekan normalitas, apabila tingkat signifikansi dari hasil pengujian data lebih besar daripada 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu data memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Berdasarkan analisis data, angka asymp.sig untuk uji Kolmogorov-Smirnov yang menguji normalitas adalah 0,200. Data dari model regresi menunjukkan distribusi normal karena nilai sig lebih besar dari 0,05.

4.1.2 Uji Multikolonieritas

uji multikolinearitas diterapkan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen dalam model regresi memiliki kaitan yang kuat satu sama lain (Ghozali, 2021). Data dianggap tidak mengandung multikolonieritas apabila skor VIF (Variance Inflation Factor) < 10 dan/atau skor toleransi > 0,10.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal memiliki hasil VIF sebesar 1,062 dan toleransi sebesar 0,942. Sementara itu, rasio efektivitas PAD mencatat hasil VIF sebesar 1,052 dan toleransi sebesar 0,950. Untuk rasio efisiensi keuangan daerah, hasil VIF yang tercatat adalah 1,023 dengan toleransi mencapai 0,978. Hal ini menunjukkan semua variabel independen mendapatkan hasil VIF di bawah 10 dan skor toleransi melebihi 0,10. Maka dari itu disimpulkan model regresi ini bebas dari multikolinearitas.

4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ditemukan variasi yang berbeda dalam varians residual di antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model (Ghozali, 2021). Hasil analisis data dalam pengujian heteroskedastisitas dapat diamati melalui gambar yang tersedia di bawah ini:

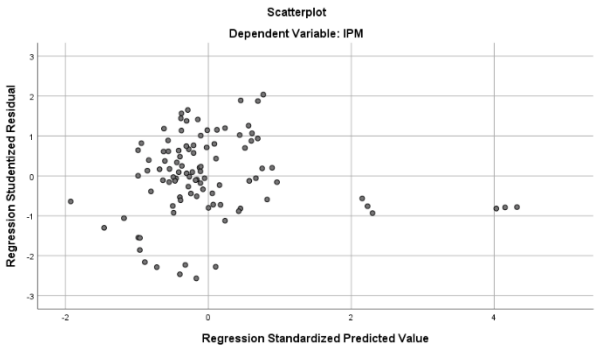

Gambar 1: Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan tidak terdapat perluasan, penyempitan, atau perluasan kembali pada grafik dan menampilkan titik data yang terdistribusi di atas dan di bawah angka nol pada nilai sumbu Y, oleh karena itu gejala

heteroskedastisitas tidak terdapat pada model regresi penelitian ini.

4.1.4 Uji Autokorelasi

Dalam regresi linier, pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ditemukan korelasi antara residu di satu periode dengan residu di periode sebelumnya (Ghozali, 2021). Nilai Durbin-Watson (D-W) yang diperoleh berdasarkan hasil uji adalah 1.875. Jika nilai d (4-DW) melebihi dU (Durbin Upper), kondisi tersebut tidak terpenuhi. Dengan empat variabel dan ukuran sampel 99, tabel D-W memberikan nilai dU sebesar 1.7575 pada tingkat signifikansi 5%. Karena nilai d (2.125) lebih besar daripada nilai dU (1.7575), maka hasil uji autokorelasi membuktikan bahwa data penelitian tidak mengandung autokorelasi.

4.2 Uji Hipotesis

4.2.1 Uji t (Parsial)

Uji t berfungsi untuk mengevaluasi dampak setiap variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keputusan yang didasarkan pada nilai signifikansi (Ghozali, 2021). Apabila tingkat signifikansi berada di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. sebaliknya, jika tingkat signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen tidak memberikan pengaruh pada variabel dependen.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi untuk rasio desentralisasi fiskal adalah 0,000 dan untuk rasio efektivitas PAD sebesar 0,047. Kedua tingkat signifikansi dari variabel tersebut berada dibawah 0,05, yang mengindikasikan bahwa rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM. Sebaliknya, rasio efisiensi keuangan daerah memiliki level signifikansi 0,412, nilai tersebut lebih tinggi dari 0,05, yang menerangkan yakni rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

4.2.2 Uji F (Simultan)

Uji F diterapkan untuk mengidentifikasi apakah variabel independen memiliki dampak secara bersamaan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Jika level signifikansi tidak lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat dampak kolektif antara variabel independen dan variabel dependen. Namun, jika nilainya lebih dari 0,05 diputuskan tidak terdapat dampak kolektif dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis uji F menghasilkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,000. Dikarenakan tingkat signifikansi ini berada di bawah 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan yakni secara simultan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap variabel IPM.

4.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi diterapkan guna menguji seberapa jauh model regresi dapat mendeskripsikan variasi pada variabel independen, dengan nilai yang terdapat pada rentang antara 0 hingga 1 (Ghozali, 2021). Hasil dari pengujian memperlihatkan bahwa nilai R-Square yang sudah disesuaikan adalah 0,436 atau 43,6%. Hasil R-Square tersebut menunjukkan IPM dapat dijabarkan oleh variabel-variabel dalam model penelitian, yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah, dengan persentase mencapai 43,6%. Sementara itu, faktor-faktor lain yang berdampak pada IPM yang tidak tercakup dalam studi ini adalah sebesar 56,4%.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal terhadap IPM

Temuan dari studi ini menunjukkan rasio desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap IPM, yang dibuktikan oleh tingkat signifikansi hasil pengujian variabel rasio desentralisasi fiskal terhadap IPM sebesar 0,000 (< 0,05).

Desentralisasi fiskal merujuk pada proses pengalihan anggaran dari pemerintah pusat kepada PEMDA. Tujuan dari proses ini ialah untuk mengakomodasi pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan, serta untuk memfasilitasi penyediaan layanan publik di tingkat daerah (Siregar, 2023a). Oleh karena itu, hal ini dapat meningkatkan pelayanan publik melalui manajemen sumber daya yang lebih efektif. Desentralisasi akan memperdekat pemerintah dengan masyarakat, akibatnya dalam tatanan pemerintahan yang terdesentralisasi, efisiensi dapat terwujud dalam ekonomi dan, pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dapat mengalami peningkatan.

Temuan dari penelitian ini selaras dengan temuan dalam penelitian (Lupita & Rahman, 2025; Maulana, 2023; Sari & Riharjo, 2020; Siregar, 2023a; A. Wibawa et al., 2023) yang menyatakan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh pada IPM.

4.4.2 Pengaruh Rasio Efektivitas PAD terhadap IPM

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM, dengan tingkat signifikansi yang dibuktikan dari pengujian variabel rasio efektivitas PAD terhadap IPM senilai 0,047 (kurang dari 0,05). Rasio efektivitas PAD mencerminkan sejauh mana PEMDA dapat merealisasikan PAD yang telah direncanakan, jika dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi yang ada di daerah tersebut (Siregar, 2023a).

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian suatu aktivitas di bidang publik, oleh karena itu dapat dinyatakan efektif jika aktivitas yang dilaksanakan memiliki dampak yang signifikan terhadap kapasitas PEMDA dalam menyediakan layanan publik (Adipura et al., 2022). Apabila pertumbuhan rasio efektivitas PAD meningkat, maka pengeluaran belanja yang dilakukan PEMDA kabupaten serta kota di Sumatera Utara juga akan semakin berkualitas dan akan terfokus pada investasi pembangunan sarana/prasarana publik, dimana pada akhirnya akan memiliki pengaruh yang konkret terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten serta Kota di Sumatera Utara.

Penelitian ini selaras dengan studi yang dilaksanakan (Adipura et al., 2022; Hamimah & Zulkarnain, 2020; Siregar, 2023b) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD berpengaruh terhadap IPM.

4.4.3 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap IPM

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan membuktikan bahwa rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat signifikansi yang diperoleh saat menguji korelasi antara variabel rasio efisiensi keuangan daerah dan IPM yang mencapai tingkat signifikansi 0,412, dimana lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.

Efisiensi dalam mengelola keuangan daerah merupakan suatu keharusan untuk setiap pemerintah daerah. Semakin besar rasio pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan, semakin rendah tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut (Adipura et al., 2022). Pengukuran tingkat efisiensi diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi pengerjaan suatu aktivitas dengan cara menganalisis input yang dipergunakan dan membandingkannya dengan output yang diperoleh.

Rasio efisiensi keuangan daerah kabupaten serta kota di Sumatera Utara periode 2022 – 2024 menggambarkan bahwa kabupaten serta kota di Sumatera Utara belum efisien dalam mengelola keuangan daerahnya, dimana tahun 2022 sebesar 102,22%, tahun 2023 sebesar 101,36%, dan tahun 2024 sebesar 101,59%. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran belanja daerah masih lebih tinggi daripada realisasi total pendapatan daerah yang diterima. Pengelolaan anggaran yang baik dapat mengurangi pengeluaran sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk investasi di bidang-bidang strategis guna meningkatkan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah nantinya akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan layanan publik dan mensejahterakan masyarakat secara optimal.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan hasil-hasil yang diperoleh oleh (Adipura et al., 2022; Siregar, 2023b, 2023a) yang juga menghasilkan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

4.4.4 Pengaruh Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara simultan terhadap IPM

Bersumber pada pengujian simultan yang telah dilaksanakan menghasilkan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM, dimana tingkat signifikansi yang dihasilkan melalui pengujian variabel rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah terhadap IPM sebesar 0,000 (< 0,05).

Salah satu elemen yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemerintahan serta pengembangan di suatu wilayah adalah manajemen keuangan daerah yang efektif serta selaras dengan cita-cita pembangunan serta kebutuhan masyarakat. Kinerja pemerintah yang sering dijadikan tolok ukur untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah salah

satunya kinerja keuangan. Jika terjadi peningkatan pengelolaan kinerja keuangan yang optimal secara bersamaan, maka ini akan berkaitan dengan peningkatan pengeluaran yang digunakan untuk mendanai pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang tepat sasaran guna memenuhi kebutuhan layanan bagi masyarakat sehingga nilai IPM meningkat.

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian (Adipura et al., 2022; Sari & Riharjo, 2020) yang menghasilkan rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan mempengaruhi IPM.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti mengenai dampak hubungan kinerja keuangan PEMDA, yang meliputi rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD serta rasio efesiensi keuangan daerah terhadap IPM. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara periode 2022-2024. Di sisi lain, rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara tahun 2022-2024. Pengujian secara simultan juga dilakukan dalam peneltian ini dengan hasil rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah secara simultan mempengaruhi IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara tahun 2022-2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kinerja pengelolaan pemerintahan dan keuangan di tingkat PEMDA dalam konteks desentralisasi dengan menerapkan asas efektivitas dan efisiensi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara optimal. PEMDA harus memastikan bahwa pengeluaran belanja dilakukan secara efisien dan lebih teliti dalam pola belanja pemerintah, serta memanfaatkan semua potensi yang tersedia di daerah masing-masing. Selain itu, penting untuk mengurangi kebergantungan finansial pada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan PAD, menciptakan kebijakan baru yang inovatif, dan membangun kerja sama antar daerah untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menerapkan data dari Laporan Realisasi APBD dan nilai IPM kabupaten serta kota di Sumatera Utara selama rentang waktu tiga tahun yaitu tahun 2022-2024 untuk pengujian, sehingga hasilnya tidak bisa diterapkan secara umum untuk daerah Kabupaten/Kota lainnya. Dari keterbatasan itu, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian berikutnya, seperti menggunakan data dalam pengujian lebih dari kurun waktu tiga tahun, memperluas cakupan penelitian dengan memilih kabupaten dan kota di provinsi lain yang APBDnya lebih besar serta menambah variabel-variabel di luar model peneltian ini yang mempunyai pengaruh terhadap IPM.

DAFTAR REFERENSI

Adipura, I. S., Rahayui, S., & Junaidi. (2022). The Effect of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence, Effectiveness and Efficiency on Economic Growth and Human Development Index as Intervening Variables (Empirical Study on Regency/City Government in Jambi Province 2016-2019). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, *7*(2), 82–92.

Anggraini, T., & Sutaryo. (n.d.). *Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah terhadap indeks pembangunan manusia pemerintah provinsi di Indonesia*.

Asri, J. D., Sinurat, M., & Agustina, I. (2025). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (2017-2022). *Jurnal Media Birokrasi*, *7*(1), 88–108.

Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi 2*. Upp STIM YKPN.

Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.

Ghazali, R. (2023). Menyoal Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Ilmu Dan Budaya*, *44*(2), 71–82.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamimah, H., & Zulkarnain, Z. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Rekan: Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan*, *1*(2), 2721–4109.

Hardana, A., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Global Financial Accounting Journal*, *6*(1).

https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216

Iqbal, M. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Pendapatan Transfer , Pada Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, *5*(2), 157–170. https://doi.org/10.32477/jrabi.v5i2.

Lupita, W., & Rahman, A. (2025). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah kota dan kabupaten. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, *14*(09), 1379–1388.

Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Issue 1). https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049

Maulana, S. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten / Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Jma : Journal of Metaverse Adpertisi*, *2*(2), 10–16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020). https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020

Ramadhan, A. V. G., & Setiawati, E. (2022). The Effect of Regional Government's Finance Ratio to Human Development Index of Provincial Government in Indonesia. *Prosiding University Research Colloquium*, 325–335.

Ramadhan, M., Kustiawan, M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Kemandirian keuangan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, *2*(6).

Sari, F. N., & Riharjo, I. B. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(e-ISSN: 2460-0585), 1–16.

Siregar, H. A. (2023a). Analisis Dampak Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekanbaru. *Kurs : Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, *8*(2). https://doi.org/10.35145/kurs.v8i2.3865

Siregar, H. A. (2023b). Aspek Kinerja Keuangan Daerah yang Berdampak Pada Pembangunan Manusia di Daerah Pemekaran. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, *13*(2), 157–167. https://doi.org/10.37859/jae.v13i2.5530

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Wibawa, A., Antarini, L., & Marsitadewi, K. E. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, *8*(1), 20–34. https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.20-34

Wibawa, G. R., & Arif. (2022). Analisis Kinerja Keuangan daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Perjuangan (JUMPER)*, *3*(2), 88–100.

Yulianti, Y., & Qomariah, S. (2025). Indeks Pembangunan Manusia Ilmu Pengetahuan. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, *5*(1), 203–213. https://doi.org/10.55606/cendekia.v5i1.3512

Zuhdi, F. I. N., Mawardi, M. C., & Hidayati, I. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 - 2021 Fachenda. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *1*(12), 721–728.